Vol.16.3. September (2016): 2435-2456

# KOMITMEN ORGANISASI DAN ASIMETRI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN PADA SENJANGAN ANGGARAN

## I Wayan Adi Wiguna<sup>1</sup> I Wayan Pradnyantha Wirasedana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia E-mail: adi\_wiguna182@yahoo.com / telp: +6281239388238

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran dan untuk mengetahui komitmen organisasi dan asimetri informasi dalam memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Penelitian pada 36 SKPD Kabupaten Badung. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 108 orang yang terdiri dari 36 Kepala SKPD, 36 Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan dan 36 Kepala sub bagian Keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif pada senjangan anggaran, komitmen organisasi memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran, dan asimetri informasi memperlemah pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran.

Kata kunci: senjangan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, asimetri informasi

#### **ABSTRACT**

This study aimed to examine the effect of budget goal clarity on budgetary slack and to determining the commitment of organization and the information asymmetry in moderating influence budget goal clarity on budgetary slack in the regional government of Badung regency, research on 36 SKPD Badung. Sample selection is done by using purposive sampling method. Total respondents 108 people consisting of 36 Chief SKPD, 36 Head of Sub Division of General and Planning and 36 Head of sub-section of Finance. Data collected through questionnaires. The analysis technique used in this study is Moderated Regression Analysis. The study found that the budget goal clarity negative influence on budgetary slack, commitment organizational strengthening the influence of budget goal clarity on budgetary slack, and information asymmetry weaken the influence of budget goal clarity on budgetary slack.

**Keywords**: budgetary slack, budget goal clarity, organizational commitment, the asymmetry of information

### **PENDAHULUAN**

Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berdampak pada sistem pemerintahan yaitu pelaksanaan

otonomi daerah dan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggungjawab dan dinamis.

Tujuan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas. Tujuan otonomi daerah akan terealisasi apabila segenap lapisan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Langkah awal untuk merealisasikan keberhasilan tersebut dapat dilakukan dengan perwujudan reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak hanya sekedar perubahan format lembaga akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benarbenar tercapai (Mardiasmo, 2009:17).

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (budgeting reform) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Jika pada mulanya, pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan APBD kabupaten/kota dengan pengesahan Gubernur, maka saat ini pertanggungjawaban APBD hanya

memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda) (Mardiasmo, 2009:15).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran tidak hanya penting bagi perusahaan swasta tetapi juga penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politis. Jika pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, tetapi sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada masyarakat untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan.

Senjangan anggaran merupakan perbedaan antara realisasi anggaran dengan estimasi anggaran yang telah diprediksikan (Suartana, 2010:138). Senjangan anggaran merupakan langkah pembuat anggaran untuk mencapai target yang lebih mudah dicapai padahal kapasitas sesungguhnya masih jauh lebih tinggi. Banyak pembuat anggaran cenderung untuk menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. Konsep senjangan anggaran dapat dimulai dengan pendekatan teori keagenan.Dalam teori keagengan, hubungan agensi muncul ketika satu pihak atau lebih (*principal*) memperkerjakan pihak lain

(agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang kepada agen tersebut untuk membuat suatu keputusan (Anthony dan Govindajaran, 2006). Hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak yang terjadi pada saat prinsipal mulai mempekerjakan agen dan kemudian prinsipal mendelegasikan wewenangnya untuk pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1979). Prinsipal dan agen diasumsikan mempunyai kepentingan sendiri dan perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh prinsipal dan agen dapat memicu terjadinya konflik.

Penelitian sebelumnya yang menguji hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran menunjukan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Biantara (2014) mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran menunjukan hasil kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif pada senjangan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bulan (2011) dan Agusti (2013) menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara negatif pada senjangan anggaran. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan kontijensi (contingency approach). Penggunaan pendekatan kontijensi memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang bertindak sebagai faktor moderating atau intervening yang memengaruhi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran. Dalam penelitian ini, digunakan variabel komitmen organisasi dan asimetri informasi sebagai variabel moderasi dalam menguji hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran diterapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis dalam Priyanti, 2013:20). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dari suatu pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Pitasari dkk (2014), Agusti (2013) menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif pada senjangan anggaran sehingga kejelasan sasaran anggaran dapat mengurangi adanya senjangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Biantara dan Putri (2014) menunjukan hasil yang berbeda yaitu kejelasan sasaran berpengaruh positif pada senjangan anggaran yang artinya semakin jelas sasaran anggaran maka kemungkinan terjadinya senjangan anggaran semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Kridawan dan Mahmud (2014) menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Komitmen Organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Ikhsan dan Ishak 2008:35). Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas akan lebih bertanggung jawab jika di dukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi atau instansinya. Hal ini akan mendorong aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang di capai oleh

organisasi sehingga akan mengurangi senjangan anggaran. Komitmen organisasi dapat mempengaruhi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial. Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi (Porter *et al*,1974 dalam Darlis 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono dan Solichin (2006) dan Agusti (2013) menunjukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2009) menunjukan hasil yang berbeda yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana bawahan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan atasan atau sebaliknya dimana atasan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan bawahan . Apabila atasan mempunyai informasi yang lebih banyak daripada bawahan, maka akan terjadi suatu tuntutan yang lebih besar dari atasan agar pelaksana anggaran dapat mencapai target anggaran. Apabila bawahan mempunyai informasi yang lebih banyak dari yang dimiliki oleh atasan, maka pelaksana anggaran akan menyatakan target lebih rendah daripada kemungkinan untuk dicapai (Suartana, 2010:140). Asimetri informasi dapat digunakan oleh bawahan untuk menyembunyikan informasi mengenai kinerjanya, yang mengakibatkan kurangnya motivasi untuk meningkatkan hasil karena ketidakmampuannya dapat ditutupi oleh asimetri informasi (De Faria dan Silva, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Agusti

(2013) menunjukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap

hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Kridawan dan Mahmud (2014) menunjukan hasil

yang berbeda yaitu asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap hubungan

antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.

Penelitian ini akan dilakukan pada organisasi sektor publik dengan obyek

penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Badung.

Pemilihan lokasi ini karena merupakan organisasi sektor publik dengan

pendapatan daerah terbesar di Bali sehingga memerlukan penanganan yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat

dirumuskan hipotesis:

H<sub>1</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada senjangan anggaran.

H<sub>2</sub>: Komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada

senjangan anggaran

H<sub>3</sub>: Asimetri informasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada

senjangan anggaran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Alasan peneliti memilih

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai lokasi penelitian karena

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung karena merupakan organisasi sektor publik

dengan pendapatan daerah terbesar di Bali. Objek dalam penelitian adalah

senjangan anggaran yang dijelaskan dengan kejelasan sasaran anggaran,

2441

komitmen organisasi dan asimetri informasi, studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung.

Variabel bebas atau *independent variable* adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab dari timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013:59). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran diterapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Variabel kejelasan sasaran diukur dengan menggunakan 7 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Putra (2013) yang diukur dengan skala likert 5 point

Variabel terikat atau *dependent variable* adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel-variabel independen (bebas) (Sugiyono, 2013:59). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah senjangan anggaran Senjangan anggaran didefinisikan sebagai tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya ketika dia diberi kesempatan untuk menentukan standar kerjanya (Young, 1985), sedangkan Anthony dan Govindarajan (1998) mendefinisikan senjangan anggaran sebagai perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi yang sesungguhnya. Tujuannya agar target dapat lebih mudah dicapai oleh bawahan. Variabel senjangan anggaran diukur menggunakan 6 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Mahadewi (2014) yang diukur dengan skala likert 5 point.

Variabel moderasi atau *moderating variable* adalah variable yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen.(Sugiyono,2013:60). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi dan asimetri informasi. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadinya (Wiener, 1982). Variabel ini diukur dengan mengunakan 5 poin skala likert yang terdiri dari 8 buah pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Ratna (2015). Asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila pemilik atau atasan tidak memliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen/bawahan sehingga atsan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan (Falikhatun 2007:6). Variabel asimetri informasi diukur menggunakan instrument yang terdiri dari 5 pertanyaan yang diadopsi penelitian Rukmana (2013) yang diukur dengan skala likert 5 point.

Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013:12).Dalam penelitian ini data kuantitatif diperoleh dari data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan bantuan skala likert. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum,sejarah,struktur organisasi serta uraian tugas,berupa hasil jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden.

Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan tidak melalui perantara (Sugiyono, 2013:193). Dalam hal ini data primer diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan kepada responden. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013:193). Data sekunder dalam penelitian ini berupa sejarah organisasi, dan visi dan misi, dan struktur organisasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat yang berwenang dalam penyusunan anggaran pada SKPD di Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 108 orang yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu kepala dinas/kepala badan/kepala kantor/camat, kepala sub bagian keuangan, dan kepala sub bagian perencanaan dan umum yang terlibat di dalam penyusunan anggaran pada SKPD Kabupaten Badung yang telah bekerja lebih dari satu tahun.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:199). Kuesioner yang disebarkan berupa pertanyaan dan pernyataan kepada responden mengenai komitmen organisasi dan asimetri informasi sebagai pemoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2435-2456

Uji analisis koefisien regresi akan menggunakan uji *Moderating Regression Analysis (MRA)*. Persamaan statistik yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_2 + \beta_5 X_1 X_3 + \epsilon \dots (1)$$

## Keterangan:

Y : Senjangan anggaran

X<sub>1</sub> : Kejelasan sasaran anggaranX<sub>2</sub> : Komitmen organisasi

X<sub>2</sub> : Kollittileli organisa X<sub>3</sub> : Asimetri informasi

 $X_1X_2$  : Interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi  $X_1X_3$  : Interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan asimetri informasi

a : Konstanta

 $\beta_1$ - $\beta_5$  : Koefisien regresi berganda

ε : Standar error

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diamati mengenai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji kelayakan model (uji F), dan uji hipotesis (uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain minimum, maksimum, *mean*, dan standard deviasi. Hasil dari statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	108	15	35	30,07	3,401
X2	108	20	40	33,12	4,642
X3	108	10	25	19,52	3,923
Y	108	12	20	15,37	1,520

Sumber: data primer diolah, (2016)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran  $(X_1)$  memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 35 dengan nilai rata-rata sebesar 30,07, jika dibagi dengan 7 item pertanyaan akan

menghasilkan nilai sebesar 4,20 yang artinya rata – rata responden memberikan skor 4 untuk item pertanyaan kejelasan sasaran anggaran. Nilai standar deviasi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 3,401 . Hal ini berarti standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 3,401.

Variabel Komitmen Organisasi (X<sub>2</sub>) memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebersar 40 dengan nilai rata-rata sebesar 33,12, jika dibagi dengan 8 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 4,02 yang artinya rata – rata responden memberikan skor 4 untuk item pertanyaan komitmen organisasi. Nilai standar deviasi variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 4,462. Hal ini berarti standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 4,462.

Variabel asimetri informasi (X<sub>3</sub>) memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 19,52, jika dibagi dengan 5 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 3,90 yang artinya rata – rata responden memberikan skor 3 untuk item pertanyaan asimetri informasi. Nilai standar deviasi variabel asimetri informasi adalah sebesar 3,923. Hal ini berarti standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 3,923.

Variabel senjangan anggaran (Y) memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan nilai rata-rata sebesar 15,37,jika dibagi dengan 6 item pertanyaan akan menghasilkan nilai sebesar 2,56 yang artinya rata – rata responden memberikan skor 2 untuk item pertanyaan kejelasan sasaran anggaran.Nilai standar deviasi variabel senjangan anggaran adalah sebesar 1,520.

Hal ini berarti standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 1,520.

Uji validitas dilakukan dengan melihat *Pearson Correlatin*. Berdasarkan analisis diperoleh nilai *person correlation* kejelasan sasaran anggaran yaitu sekitar 0,696 - 0,833 > 0,30. Nilai *person correlation* komitmen organisasi yaitu sekitar 0,652 - 0,872 > 0,30. Nilai *person correlation* asimetri informasi yaitu sekitar 0,819 - 0,933 > 0,30. Sedangkan nilai *person correlation* variabel senjangan anggaran yaitu sekitar 0,592 - 0,934 > 0,30. Dengan demikian keseluruhan dari pernyataan kuesioner penelitian ini valid.

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat *Cronbach's alpha*. Berdasarkan analisis nilai *Cronbach's alpha* kejelasan sasaran anggaran adalah 0,880, komitmen organisasi sebesar 0,889, asimetri informasi sebesar 0,929 dan senjangan anggaran 0,862 sehingga seluruh nilai *Cronbach's alpha* variabel > 0,60, dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa koefisien *Asymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0,784 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual		
N	108		
Kolomogorov-Smirnov Z	0,655		
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,784		

Sumber: data primer diolah, (2016)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masingmasing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yang artinya regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala hetrokedastisitas.

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,063	Bebas Heterokedastisitas
Komitmen Organisasi	0,522	Bebas Heterokedastisitas
Asimetri Informasi	0,187	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: data primer diolah, (2016)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinnearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,171	7,148
Komitmen Organisasi	0,133	7,509
Asimetri Informasi	0,120	8,091
X1X2	0,178	8,772
X1X3	0,113	9,551

Sumber: data primer diolah, (2016)

 $Y = 23,931 - 0,070X_1 - 0,098X_2 + 0,316X_3 - 0,001X_1X_2 + 0,007X_1X_3......(2) \\$ 

Tabel 5.
Hasil Uji *Moderating Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	_ t	Signifikansi
	B Std. Error		Beta		
(Constant)	23,931	3,939		6,076	0,000
KSA (X1)	-0,070	0,135	-0,156	-,0517	0,016
KO (X2)	-0,098	0,072	-0,299	-1,360	0,017
AI (X3)	0,316	0,222	0.815	1,419	0,045
X1X2	-0,001	0,002	-0,163	-0,569	0,035
X1X3	0,007	0,007	0,701	0,984	0,032
Adjusted R Square			0,310		
F hitung			10,593		
Signifikansi F			0,000		

Sumber: data primer diolah, (2016)

Nilai konstantan sebesar 23,931 memiliki arti apabila kejelasan sasaran anggaran  $(X_1)$ , komitmen organisasi  $(X_2)$ , asimetri informasi  $(X_3)$  sama dengan nol, maka nilai senjangan anggaran (Y) sebesar 23,931 satuan. Nilai koefisien β<sub>1</sub> = -0,070 menunjukan bila nilai kejelasan sasaran anggaran (X<sub>1</sub>) bertambah 1 satuan, maka nilai dari senjangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,070 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_2 = -0.098$ menunjukan bila nilai komitmen organisasi (X<sub>2</sub>) bertambah 1 satuan, maka nilai dari senjangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,098 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_3 = 0.316$  menunjukan bila nilai asimetri informasi (X<sub>3</sub>) bertambah 1 satuan, maka nilai dari senjangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,316 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_4 = -0,001$  menunjukan bila nilai interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi  $(X_1X_2)$  bertambah 1 satuan, maka nilai dari senjangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,001 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien  $\beta_5 = 0,007$ menunjukan bila nilai interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan asimetri informasi (X<sub>1</sub>X<sub>3</sub>) bertambah 1 satuan, maka nilai dari senjangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,007 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,310 yang berate bahwa 31% perubahan (naik turun) yang terjadi pada senjangan anggaran dipengaruhi/dijelaskan oleh kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, asimetri informasi, interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan

komitmen organiasasi dan interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan asimetri informasi sementara sisanya sebesar 69% dipengaruhi/dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai Sig. F sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, hal ini berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, asimetri informasi, interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi dan interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan asimetri informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap senjangan anggaran pada tingkat signiikansi 5 persen dan menunjukan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak uji.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki tingkat signifikan sebesar 0,016 lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, yang artinya hipotesis 1 yang menyatakan kejelasan sasaran berpengaruh pada senjangan anggaran diterima (H<sub>1</sub> diterima).

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa interaksi antara variabel kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organiasai memiliki tingkat signifikan sebesar 0,035 lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>2</sub> diterima, yang artinya hipotesis 2 yang menyatakan komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran diterima (H<sub>2</sub> diterima).

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa interaksi antara variabel kejelasan sasaran anggaran dengan asimetri informasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,032 lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>3</sub> diterima, yang

artinya hipotesis 3 yang menyatakan asimetri informasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran diterima (H<sub>3</sub> diterima).

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 5 dapat dilihat bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai  $\beta_1$  sebesar -0,070 dengan tingkat signifikansi 0,016 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima, yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh pada senjangan anggaran, dilihat dari  $\beta_1$  yang memiliki nilai negatif menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran aggaran, maka kemungkinan terjadinya senjangan akan semakin rendah.

Kejelasan sasaran anggaran yaitu menggambarkan tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Tingkat kejelasan sasaran anggaran akan menunjukkan seberapa besar informasi yang diperoleh pihak-pihak tersebut. Semakin jelas dan spesifiknya sasaran anggaran maka anggaran akan disusun sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sehingga dapat menurunkan terjadinya senjangan anggaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Pitasari dkk (2014) dan Agusti (2013) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 5 dapat dilihat bahwa interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi memiliki nilai β<sub>4</sub> sebesar -0,001 dengan tingkat signifikansi 0,035 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran. Dengan demikian hipotesis kedua (H<sub>2</sub>)

diterima, yaitu komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran, dilihat dari  $\beta_4$  yang memiliki nilai negatif menunjukan komitmen organisasi memperkuat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran.

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas, akan lebih bertanggungjawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang dicapai oleh organisasi sehingga akan mengurangi senjangan anggaran. Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi tidak akan menimbulkan senjangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Agusti (2013) dan Suhartono dan Solichin (2006) yang menunjukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 5 dapat dilihat bahwa interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan asimetri informasi memiliki nilai β<sub>5</sub> sebesar 0,007 dengan tingkat signifikansi 0,032 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti asimetri informasi mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran. Dengan demikian hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) yang menyatakan bahwa asimetri informasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran

anggaran pada senjangan anggaran diterima. Dilihat dari β<sub>5</sub> yang menunjukan nilai

positif menunjukan bahwa asimetri informasi memperlemah hubungan antara

kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran.

Hasil penelitian ini menunjukan jika informasi bawahan (aparat pemerintah)

lebih baik dari atasan (terdapat asimetri informasi) maka bawahan mengambil

kesempatan dari partisipasi penganggaran dengan membuat anggaran yang

relative mudah dicapai sehingga terjadilah senjangan anggaran jadi walaupun ada

kejelasan sasaran anggaran dan terdapat asimetri informasi maka senjangan

anggaran masih dapat terjadi. Dengan kata lain asimetri informasi memoderasi

pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjngan anggaran. Hal ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2013) yang menyatakan bahwa

asimetri informasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara kejelasan

sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis dan

pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah kejelasan sasaran anggaran

berpengaruh negatif pada senjangan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung, yang artinya semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran maka

akan menurunkan senjangan anggaran. Komitmen organisasi memperkuat

pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran di Pemerintah

Daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi komitmen organisasi dalam kejelasan

sasaran anggaran maka akan berdampak pada menurunnya senjangan anggaran.

2453

Asimetri informasi memperlemah pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Semakin tinggi asimetri informasi dalam kejelasan sasaran anggaran maka akan berdampak pada meningkatnya senjangan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah Pegawai pada SKPD Kabupaten Badung sebaiknya tetap mempertahankan komitmen yang dimiliki terhadap organisasi, karena dengan adanya komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan mendorong intitusi untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang dicapai oleh organisasi sehingga akan mengurangi senjangan anggaran. Selain itu, kejelasan sasaran anggaran harus diperhatikan pada saat penyusunan anggaran, karena semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran, maka dapat menurunkan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. Pegawai pada SKPD Kabupaten Badung sebaiknya tidak memanfaatkan asimetri informasi untuk kepentingan individu, demi tercapainya kinerja yang lebih baik dan mengurangi terjadinya senjangan anggaran. Penelitian berikutnya sebaiknya mengambil populasi pada tempat yang berbeda, karena hasil penelitian dapat berbeda. Selain itu, penelitian sejenis berikutnya sebaiknya menggunakan variabel independen atau variabel moderasi yang berbeda yang diduga mempunyai pengaruh terhadap timbulnya senjangan anggaran.

#### REFERENSI

Agusti, Restu. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Komitmen Organisasi dan Informasi Asimetri. *Jurnal Ekonomi*, 19 (4).

Anthony, Robert N, dan Vijay Govindarajan. 2006.Sistem Pengendalian Manajemen.Salemba Empat. Jakarta: Salemba Empat.

- Biantara, A.A Adi dan Putri, I.G.A.M Asri Dwija. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Etika, dan Kepercayaan Diri pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), pp:385-391.
- Bulan, Rida Fani. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Job Relevant Information Serta Implikasinya Pada Senjangan Anggaran (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4 (1), hal: 33 50.
- Darlis, Edvan, 2000, Analisis Pengaruh Komitmen Organisational dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *SNA IV*, Bandung.
- De Faria, J.A., and Silva, S.2013. The Effects of information asymmetry on budget slack: An experimental research. *African Journal of Business Management*, 7(13), pp: 1086-1099
- Falikhatun, Dra., M.SI, AK. 2007. Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, Dan Group Cohesiveness Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran Dan Budgetary Slack (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Se Jawa Tengah). *SNA X*,pp:1-24.
- Ikhsan, Arfan, Muhammad Ishak. 2008. Akuntansi Keperilakuan.Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M.C., and Meckling, W.H. 1979. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure* (pp.163-231). Springer Netherlands.
- Kenis, I. 1979. Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review LIV* (4),pp:707-721.
- Kridawan, Aji dan Mahmud, Amir.2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*.3(2),pp:194-202.
- Mahadewi, A. A. Sagung Sinta.2014. Pengaruh Partisipasi Penganggaran Pada Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,8(3),pp: 458-473.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Pitasari, K.K.A., Sulindawati, N.L.G.E., dan Atmaja, A.T.A. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Keadilan Prosedural terhadap Senjangan

- Anggaran (*Budgetary Slack*) pada SKPD berupa Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Universitas Pendidikan ganesha: *Jurnal Akuntansi*,2(1).
- Porter, Steers, Mowday, and Boulian.1974.Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians. *Journal of Applied Psychology*,59 pp: 603-609.
- Priyanti, Eni.2013. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Anggaran Sebagai Variabel Moderating Di Lingkungan SKPD Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Putra, Deki.2013.Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Rahman, Firdaus A.2009. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Universitas Islam Riau, 15(1), pp:85-101.
- Ratna, Dita Pilih. 2015. Pengaruh Partisipasi Penganggaran pada Kinerja Manajerial di LPD Kota Denpasar. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2), pp:595-610.
- Rukmana, Paingga DB.2013.Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Asimetri Informasi terhadap Timbulnya *Budget Slack.Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Suartana, Wayan. 2010. Akuntansi Keprilakuan Teori dan Implementasi. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Bisnis". Bandung: CV Alfabeta.
- Suhartono, Ehrmann & Mochamad Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Padang, 9 (5), pp: 1-20.
- Wiener, Y. 1982. Commitment in organizations: A normative view. Academy of Management Review, 7, 418-428.
- Young, S.M.1985.Participative Budgeting: The Effect of Risk Aversion and Assymetric Information on Budgetary Slack. *Journal of Accounting Research*, 23,pp: 829-842.